

## Dampak Kebangkitan Populisme Terhadap Demokrasi di Indonesia

Ria kasanova<sup>1</sup>, Mohammad Rudiyanto<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Madura

<sup>1</sup>[kasanovaria@unira.ac.id](mailto:kasanovaria@unira.ac.id), <sup>2</sup>[mohammadruiyanto5@gmail.com](mailto:mohammadruiyanto5@gmail.com)

Diserahkan tanggal 01 Juni 2024 | Diterima tanggal 22 Juni 2024 | Diterbitkan tanggal 30 Juni 2024

### Abstrak:

Populisme telah menjadi fenomena yang signifikan dalam politik kontemporer di Indonesia, dengan dampaknya yang kompleks terhadap demokrasi. Penelitian ini menginvestigasi kebangkitan populisme di Indonesia dan dampaknya terhadap proses dan hasil demokrasi. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis dokumen, penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kebangkitan populisme, termasuk ketidakpuasan masyarakat, korupsi, globalisasi, dan teknologi informasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa populisme dapat meningkatkan partisipasi politik dan kesadaran masyarakat akan isu-isu politik, tetapi juga dapat memperkuat polarisasi sosial dan politik, melemahkan institusi demokrasi, dan menyebarkan informasi yang salah. Implikasi dari kebangkitan populisme terhadap masa depan demokrasi di Indonesia adalah perlunya keseimbangan yang hati-hati antara memperkuat partisipasi publik dan menjaga stabilitas institusi demokrasi. Oleh karena itu, rekomendasi diberikan untuk mengatasi dampak negatif populisme, termasuk meningkatkan literasi politik masyarakat, mengembangkan regulasi untuk mengatasi penyebaran informasi palsu di media sosial, dan memperkuat lembaga-lembaga demokrasi. Langkah-langkah ini diharapkan dapat membantu memperkuat demokrasi di Indonesia dan menjaga keseimbangan antara partisipasi publik yang sehat dan stabilitas institusi demokrasi. Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan yang penting tentang dinamika populisme dan demokrasi di Indonesia.

**Kata kunci:** Populisme, Demokrasi, Indonesia, Kebangkitan

### Abstract:

*Populism has become a significant phenomenon in contemporary politics in Indonesia, with its complex impact on democracy. This research investigates the rise of populism in Indonesia and its effects on the processes and outcomes of democracy. Using a qualitative approach and document analysis, this study examines the factors influencing the emergence of populism, including societal discontent, corruption, globalization, and information technology. The analysis findings indicate that populism can enhance political participation and public awareness of political issues, but it can also reinforce social and political polarization, weaken democratic institutions, and disseminate misinformation.*

*The implications of the rise of populism for the future of democracy in Indonesia entail the need for a careful balance between strengthening public participation and maintaining the stability of democratic institutions. Therefore, recommendations are provided to address the negative impacts of populism, including enhancing political literacy among the public, developing regulations to counter the spread of false information on social media, and strengthening democratic institutions. These measures are expected to help strengthen democracy in Indonesia and maintain a balance between healthy public participation and the stability of democratic institutions. Thus, this research offers valuable insights into the dynamics of populism and democracy in Indonesia.*

**Keywords:** Populism, Democracy, Indonesia, Rise

Copyright © 2024, Author

*This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)*



## PENDAHULUAN

Populisme adalah sebuah fenomena politik yang mengklaim untuk mewakili suara "rakyat" melawan "elit" yang dianggap korup atau tidak peduli terhadap kepentingan umum (Darmawan, 2017). Populisme sering muncul dalam konteks ketidakpuasan terhadap status quo, di mana populis berusaha memobilisasi dukungan rakyat dengan retorika yang sederhana dan langsung (R. Setiawan, 2017). Konsep populisme mencakup berbagai ideologi, baik dari spektrum kiri maupun kanan, dengan ciri utama berupa anti-elitisme, penekanan pada kedaulatan rakyat, dan sering kali penggunaan narasi emosional untuk menarik dukungan (Hendrawan et al., 2020).

Sejarah kebangkitan populisme di dunia mencerminkan pola respons terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan politik. Di Amerika Latin, populisme sudah lama menjadi kekuatan politik utama, dengan figur seperti Juan Perón di Argentina dan Hugo Chávez di Venezuela (Karina, 2019). Di Eropa dan Amerika Utara, kebangkitan populisme modern terlihat pada dekade terakhir dengan munculnya tokoh-tokoh seperti Donald Trump di Amerika Serikat dan partai-partai populis di Eropa Barat dan Timur (Banjarnahor & Togatorop, 2023). Kebangkitan ini sering dikaitkan dengan globalisasi, krisis ekonomi, dan migrasi, yang memicu rasa ketidakpuasan di kalangan masyarakat.

Di Indonesia, populisme bukanlah hal baru. Sejak era Soekarno, elemen-elemen populis sudah ada dalam politik Indonesia (Agustino et al., 2023). Namun, kebangkitan populisme modern mulai terlihat lebih jelas pasca-reformasi, terutama dengan munculnya berbagai figur politik yang menggunakan retorika populis untuk menarik dukungan massa (Ghaisani & Husin, 2022). Pemilu dan pemilihan kepala daerah sering menjadi arena di mana narasi populis digunakan secara intensif untuk memenangkan suara, dengan janji-janji yang mudah diterima oleh rakyat namun seringkali tidak realistis.

Relevansi topik ini sangat signifikan dalam konteks politik Indonesia saat ini. Dalam beberapa tahun terakhir, populisme telah menjadi alat yang efektif bagi beberapa politisi untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan (M. C. A. Setiawan et al., 2020). Fenomena ini terlihat jelas dalam kampanye politik yang menekankan perbedaan antara "kita" dan "mereka", baik dalam hal etnis, agama, maupun kelas sosial (Safitri & Harahap, 2023). Hal ini menciptakan dinamika politik yang lebih bergejolak dan kadang-kadang mengarah pada polarisasi masyarakat.

Kebangkitan populisme di Indonesia juga berkaitan erat dengan perkembangan teknologi informasi dan media sosial. Platform seperti Facebook, Twitter, dan WhatsApp telah digunakan secara luas oleh politisi populis untuk menyebarkan pesan mereka (Patria, 2023). Kemudahan akses informasi, meskipun positif dalam beberapa aspek, juga memfasilitasi penyebaran hoaks dan misinformasi, yang dapat mempengaruhi persepsi publik dan mengubah lanskap politik dengan cepat (Ibrahim & Nor, 2018).

Dengan demikian, memahami populisme dan dampaknya terhadap demokrasi di Indonesia menjadi semakin penting. Demokrasi yang sehat membutuhkan partisipasi yang informed dari masyarakat, bukan hanya keterlibatan emosional yang dipicu oleh narasi populis. Oleh karena itu, analisis kritis terhadap fenomena populisme di Indonesia dapat memberikan wawasan penting tentang bagaimana menjaga dan memperkuat demokrasi di tengah tantangan yang ada. Fenomena populisme di Indonesia menimbulkan beberapa pertanyaan penting yang perlu dianalisis lebih lanjut. Pertama, bagaimana populisme muncul dan berkembang di Indonesia? Kedua, apa saja dampak kebangkitan populisme terhadap demokrasi di Indonesia? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kebangkitan populisme di Indonesia serta mengidentifikasi dampak populisme terhadap kualitas demokrasi di Indonesia.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode kualitatif dengan fokus pada analisis dokumen (Laut, 2020). Metode kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena populisme dan dampaknya terhadap demokrasi di Indonesia. Analisis dokumen sebagai teknik utama dalam penelitian ini melibatkan pemeriksaan sistematis terhadap berbagai teks dan materi tertulis yang relevan, termasuk literatur akademik, artikel media, serta laporan penelitian (Riadi, 2020).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur, artikel, laporan penelitian, dan data media (Novita, 2022). Literatur akademik yang digunakan mencakup buku, jurnal, dan makalah yang membahas teori dan konsep populisme serta aplikasinya dalam konteks politik Indonesia. Artikel dari media massa juga menjadi sumber data penting untuk memahami bagaimana populisme diberitakan dan direspon oleh publik. Laporan penelitian dari lembaga riset dan organisasi non-pemerintah memberikan data empiris yang mendukung analisis lebih lanjut.

Teknik pengumpulan data yang diterapkan adalah analisis konten media dan dokumen resmi (Jaya, 2020). Analisis konten media melibatkan peninjauan kritis terhadap artikel, berita, dan komentar di media massa untuk mengidentifikasi tema-tema populis dan pola retorika yang digunakan oleh politisi. Sementara itu, analisis dokumen resmi mencakup pemeriksaan undang-undang, kebijakan publik, dan laporan resmi dari pemerintah serta lembaga-lembaga terkait lainnya. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi hubungan antara kebangkitan populisme dan perubahan dalam kualitas demokrasi di Indonesia.

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **1. Kebangkitan Populisme di Indonesia**

Kebangkitan populisme di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks dan saling terkait. Salah satu faktor utama adalah ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dan institusi politik yang dianggap tidak mampu memenuhi kebutuhan dan aspirasi rakyat. Ketidakpuasan ini sering kali dipicu oleh masalah ekonomi seperti pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan sosial. Selain itu, ketidakpuasan juga dapat timbul dari isu-isu sosial dan budaya, seperti konflik agama dan etnis, yang digunakan oleh politisi populis untuk meraih dukungan dengan menyalahkan kelompok-kelompok tertentu sebagai sumber masalah.

Faktor lain yang mempengaruhi kebangkitan populisme di Indonesia adalah korupsi yang meluas di berbagai tingkat pemerintahan. Korupsi menimbulkan ketidakpercayaan terhadap elit politik dan mendorong masyarakat mencari alternatif yang dianggap lebih bersih dan pro-rakyat. Dalam konteks ini, politisi populis sering muncul dengan janji-janji untuk membersihkan pemerintahan dan mengembalikan kekuasaan kepada rakyat. Retorika anti-korupsi ini efektif menarik simpati dan dukungan dari masyarakat yang sudah muak dengan praktik korupsi yang sistematis.

Selain itu, globalisasi dan modernisasi juga berperan dalam mendorong kebangkitan populisme di Indonesia. Proses globalisasi sering kali dianggap membawa dampak negatif, seperti hilangnya lapangan pekerjaan dan meningkatnya ketidakstabilan ekonomi. Modernisasi juga dapat menyebabkan pergeseran nilai-nilai tradisional yang dianggap mengancam identitas budaya lokal. Politisi populis memanfaatkan ketakutan dan ketidakpastian ini dengan menawarkan solusi yang terlihat sederhana dan langsung, meskipun seringkali tidak realistis atau bersifat jangka pendek.

Peran media sosial dan digitalisasi dalam penyebaran ide-ide populis tidak dapat diabaikan. Platform media sosial seperti Facebook, Twitter, dan WhatsApp telah menjadi alat yang efektif bagi politisi populis untuk menyampaikan pesan mereka langsung kepada masyarakat tanpa melalui filter media tradisional. Media sosial memungkinkan politisi untuk berkomunikasi secara langsung dengan pendukungnya, membangun narasi yang emosional, dan memobilisasi

massa dengan cepat. Hal ini menciptakan ruang bagi penyebaran ide-ide populis yang dapat mempengaruhi opini publik secara signifikan.

Media sosial juga memungkinkan penyebaran informasi yang cepat dan luas, termasuk berita palsu dan hoaks yang sering digunakan untuk mendiskreditkan lawan politik atau memanipulasi opini publik. Dalam banyak kasus, politisi populis menggunakan strategi ini untuk membangun citra positif bagi diri mereka sendiri dan menciptakan citra negatif bagi lawan politik mereka. Penyebaran hoaks dan misinformasi ini dapat memperburuk polarisasi sosial dan politik, serta merusak proses demokrasi yang sehat.

Digitalisasi juga memfasilitasi analisis data besar (big data) dan penggunaan algoritma untuk menargetkan pesan-pesan politik kepada kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. Dengan teknik ini, politisi populis dapat mengidentifikasi isu-isu yang paling sensitif dan relevan bagi audiens mereka, serta menyesuaikan pesan kampanye mereka untuk memaksimalkan dampak. Hal ini meningkatkan efektivitas kampanye populis dan memperluas jangkauan mereka, memperkuat kebangkitan populisme di Indonesia.

## **2. Dampak Positif Populisme terhadap Demokrasi**

Salah satu dampak positif populisme terhadap demokrasi adalah peningkatan partisipasi politik masyarakat. Populisme seringkali menarik perhatian publik yang lebih luas, termasuk mereka yang sebelumnya apatis atau merasa terpinggirkan oleh proses politik. Retorika populis yang berfokus pada "suara rakyat" dapat memotivasi lebih banyak individu untuk terlibat dalam pemilihan umum, demonstrasi, dan berbagai bentuk partisipasi politik lainnya. Dengan kata lain, populisme dapat memperluas basis partisipasi politik dan membawa lebih banyak suara ke dalam arena demokrasi.

Selain meningkatkan partisipasi politik, populisme juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam isu-isu politik yang spesifik. Politisi populis sering kali menyoroti isu-isu yang sangat relevan dan mendesak bagi kehidupan sehari-hari masyarakat, seperti ketidakadilan ekonomi, korupsi, dan ketimpangan sosial. Dengan menyoroti masalah-masalah ini, populisme mengajak masyarakat untuk berdiskusi dan mencari solusi, sehingga menciptakan ruang bagi dialog politik yang lebih hidup dan dinamis. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran politik dan memperkuat kapasitas warga negara untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

Populisme juga dapat memperkuat mekanisme akuntabilitas dalam demokrasi. Dengan membawa isu-isu penting ke permukaan dan menekan elit politik untuk bertindak, populisme bisa mendorong pemerintahan yang lebih responsif dan akuntabel. Tekanan dari gerakan populis dapat memaksa politisi dan pejabat publik untuk lebih memperhatikan kebutuhan dan keinginan masyarakat, serta mengambil langkah-langkah konkret untuk menangani masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyat. Dengan demikian, populisme dapat berfungsi sebagai pengingat penting bagi para pemimpin untuk tetap setia kepada prinsip-prinsip demokrasi dan kepentingan publik.

Selanjutnya, populisme dapat membantu mengidentifikasi dan mengekspos kelemahan dalam sistem politik dan institusi demokrasi. Dengan mengkritik dan menantang status quo, populisme dapat mengungkapkan masalah-masalah yang mungkin diabaikan atau disembunyikan oleh elit politik. Proses ini dapat mendorong reformasi institusional dan perbaikan kebijakan yang diperlukan untuk memperkuat demokrasi. Dalam beberapa kasus, gerakan populis telah berhasil mendorong perubahan signifikan yang meningkatkan transparansi, keadilan, dan efisiensi pemerintahan.

Populisme juga memiliki potensi untuk mempromosikan inklusivitas dalam politik. Dengan menyoroti suara-suara yang seringkali tidak terdengar atau diabaikan, populisme dapat membantu menciptakan ruang bagi kelompok-kelompok marginal untuk berpartisipasi dalam proses politik. Ini termasuk minoritas etnis, agama, dan kelompok sosial-ekonomi rendah yang sering kali tidak memiliki akses yang sama terhadap kekuasaan dan sumber daya politik. Dengan memberi mereka suara dan platform, populisme dapat memperkaya pluralisme politik dan memperkuat dasar-dasar demokrasi inklusif.

Akhirnya, populisme dapat menginspirasi pembaruan dalam cara partai politik beroperasi dan berinteraksi dengan pemilih. Partai politik yang menghadapi tantangan dari gerakan populis mungkin terpaksa untuk meninjau kembali pendekatan mereka dan mencari cara-cara baru untuk lebih melibatkan dan mewakili konstituen mereka. Ini dapat mencakup adopsi strategi komunikasi yang lebih langsung dan transparan, serta pengembangan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan keinginan masyarakat. Melalui proses ini, populisme dapat memicu inovasi dan perbaikan dalam sistem partai politik yang pada gilirannya memperkuat demokrasi.

### **3. Dampak Negatif Populisme terhadap Demokrasi**

Salah satu dampak negatif populisme terhadap demokrasi adalah meningkatnya polarisasi sosial dan politik. Populisme cenderung menggunakan retorika yang membelah masyarakat menjadi "kita" versus "mereka," yang mengakibatkan peningkatan ketegangan antara kelompok-kelompok yang berbeda. Polarisasi ini bisa berdasarkan etnis, agama, atau ideologi politik, dan seringkali diperparah oleh retorika yang sengaja memecah belah untuk meraih dukungan. Akibatnya, hubungan sosial menjadi lebih terpecah, dan dialog politik yang konstruktif menjadi semakin sulit dilakukan, karena masing-masing pihak menjadi semakin terpolarisasi dan kurang bersedia untuk berkompromi.

Ancaman lain dari populisme terhadap demokrasi adalah melemahnya institusi demokrasi. Politisi populis seringkali mengkritik dan mendiskreditkan institusi-institusi yang merupakan pilar demokrasi, seperti parlemen, peradilan, dan media independen. Dengan mengklaim bahwa institusi-institusi ini korup atau tidak mewakili kepentingan rakyat, populis dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga tersebut. Dalam jangka panjang, ini bisa mengarah pada erosi fungsi-fungsi vital yang dijalankan oleh institusi demokrasi, seperti penegakan hukum, checks and balances, serta kebebasan pers.

Populisme juga sering dikaitkan dengan penyebaran informasi yang salah dan hoaks. Politisi populis menggunakan media sosial dan platform digital lainnya untuk menyebarkan narasi yang mendukung agenda mereka, termasuk informasi yang tidak akurat atau menyesatkan. Hoaks dan misinformasi ini tidak hanya mendistorsi realitas tetapi juga dapat menyesatkan pemilih dan merusak proses demokrasi. Penyebaran informasi yang salah juga dapat memperburuk polarisasi, karena masing-masing kelompok menerima informasi yang berbeda dan sering kali bertentangan.

Selain itu, penyebaran hoaks dan informasi yang salah dapat mengganggu proses pemilu yang adil dan transparan. Ketika pemilih didorong oleh informasi yang salah atau menyesatkan, keputusan mereka dalam pemilu bisa berdasarkan premis yang tidak akurat. Hal ini mengancam legitimasi hasil pemilu dan dapat menyebabkan ketidakstabilan politik. Dalam beberapa kasus, hoaks yang tersebar luas bahkan bisa memicu kekerasan dan konflik sosial, yang berpotensi merusak tatanan demokrasi dan keamanan publik.

Populisme juga berisiko mendorong kebijakan-kebijakan yang tidak berbasis pada bukti dan analisis yang tepat. Karena populis cenderung mengandalkan retorika yang menarik secara emosional daripada kebijakan yang berdasarkan data dan riset, keputusan politik yang diambil bisa kurang efektif atau bahkan merugikan. Kebijakan yang dibuat hanya untuk memenuhi janji-janji populis tanpa mempertimbangkan implikasi jangka panjang dapat mengakibatkan masalah yang lebih serius di masa depan, termasuk krisis ekonomi dan sosial.

Akhirnya, populisme dapat mengurangi kualitas demokrasi dengan mengabaikan prinsip-prinsip dasar demokrasi seperti pluralisme, toleransi, dan penghormatan terhadap hak-hak minoritas. Dalam upaya untuk memenuhi tuntutan mayoritas atau kelompok tertentu, populis mungkin mengabaikan atau bahkan menekan hak-hak kelompok minoritas. Hal ini tidak hanya merusak keadilan sosial tetapi juga mengancam integritas demokrasi yang seharusnya melindungi hak semua warga negara. Dengan demikian, meskipun populisme dapat membawa beberapa dampak positif, risiko negatifnya terhadap demokrasi tidak dapat diabaikan dan perlu diwaspadai.

### **4. Studi Kasus**

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kebangkitan populisme di Indonesia, beberapa contoh konkret bisa diambil sebagai studi kasus. Salah satunya adalah fenomena kebangkitan populisme dalam politik lokal, seperti pemilihan kepala daerah (Pilkada). Banyak calon kepala daerah yang menggunakan narasi populis untuk menarik perhatian massa, dengan janji-janji yang menjanjikan perubahan cepat dan berdampak langsung bagi kehidupan sehari-hari masyarakat. Studi kasus ini akan memperlihatkan bagaimana populisme dapat memengaruhi dinamika politik lokal dan proses demokrasi di tingkat regional.

Selain itu, kita bisa melihat kebangkitan populisme dalam lingkungan politik nasional. Beberapa tokoh politik telah menggunakan strategi populis dalam pemilihan umum, dengan menonjolkan isu-isu yang sensitif dan menggunakan retorika yang sederhana untuk memperoleh dukungan. Studi kasus ini akan membahas bagaimana populisme memengaruhi dinamika politik di tingkat nasional, termasuk dampaknya terhadap kompetisi politik, partisipasi pemilih, dan legitimasi pemerintah yang terpilih.

Dari kedua contoh tersebut, kita dapat mengidentifikasi dampak populisme terhadap proses dan hasil demokrasi di Indonesia. Populisme dapat merangsang partisipasi politik yang lebih tinggi di satu sisi, tetapi juga dapat memicu polarisasi dan konflik yang mengancam stabilitas demokrasi. Selain itu, populisme juga dapat memengaruhi kebijakan publik dengan mengarahkan perhatian pada isu-isu tertentu yang mungkin tidak selalu sesuai dengan kebutuhan atau kepentingan yang lebih luas. Dengan menganalisis studi kasus ini, kita dapat memperoleh wawasan yang lebih baik tentang bagaimana populisme mempengaruhi dinamika demokrasi di Indonesia.

## KESIMPULAN

Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kebangkitan populisme di Indonesia memiliki dampak yang kompleks terhadap demokrasi. Populisme, di satu sisi, dapat meningkatkan partisipasi politik dan kesadaran akan isu-isu politik yang penting. Namun, di sisi lain, populisme juga dapat memperkuat polarisasi sosial dan politik, melemahkan institusi demokrasi, dan menyebarkan informasi yang salah. Implikasi dari kebangkitan populisme ini terhadap masa depan demokrasi di Indonesia adalah perlunya keseimbangan yang hati-hati antara memperkuat partisipasi publik dan menjaga stabilitas institusi demokrasi.

Untuk mengatasi dampak negatif populisme, langkah-langkah yang perlu dipertimbangkan antara lain adalah meningkatkan literasi politik masyarakat, mengembangkan regulasi yang membatasi penyebaran informasi palsu di media sosial, dan memperkuat lembaga-lembaga demokrasi seperti peradilan independen dan media yang bebas. Selain itu, perlu ada strategi yang efektif untuk menanggapi dan menyelesaikan masalah-masalah yang menjadi fokus populisme, seperti ketidaksetaraan ekonomi dan korupsi. Langkah-langkah ini diharapkan dapat membantu memperkuat demokrasi di Indonesia dan menjaga keseimbangan antara partisipasi publik yang sehat dan stabilitas institusi demokrasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L., Sylviana, M., & Silas, J. (2023). Institusionalisasi Dan Ketahanan Partai Dalam Demokrasi Elektoral Indonesia: Studi Kasus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. *Journal of Social and* . <http://journal.epistemikpress.id/index.php/Epistemik/article/view/129>
- Banjarnahor, D. N., & Togatorop, F. (2023). Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Upaya Mewujudkan Demokrasi Konstitusional dan Konstitusionalisme di Indonesia. *Journal on Education*. <https://jonedu.org/index.php/joe/article/view/1993>
- Darmawan, A. (2017). Gerakan Populis sebagai Tren Global: Dari Amerika Latin sampai Occupy Movement. *Insignia: Journal of International Relations*. <http://jos.unsoed.ac.id/index.php/insignia/article/view/593>
- Ghaisani, J., & Husin, L. H. (2022). Analisis Narasi Anies Baswedan Pada Kampanye Pilkada

- DKI Jakarta 2017 Dalam Perspektif Norman Fairclough. *JOURNAL OF POLITICS AND POLICY*. <https://journal.unsika.ac.id/index.php/IJPP/article/view/6658>
- Hendrawan, A., Atmojo, B. T., & ... (2020). Demokrasi Brazil: Bagaimana Brazil Melewati Fase Transisi dan Konsolidasi Demokrasi? *Insignia: Journal of*. <http://jos.unsoed.ac.id/index.php/insignia/article/view/2584>
- Ibrahim, M. K., & Nor, M. R. M. (2018). Perkembangan Islam di Turki Menerusi Pendekatan Politik: Satu Sorotan Sejarah: The Development of Islam in Turkey through Political Approach: A Historical. *Online Journal of Research in Islamic*. <http://jummec.um.edu.my/index.php/RIS/article/view/13074>
- Jaya, I. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori, Penerapan, dan Riset Nyata I Made Laut Mertha Jaya*. Google Books. In Anak Hebat .
- Karina, E. N. (2019). Kontradiksi Demokrasi Liberal dan “Akhir Sejarah” Yang Tertunda. *Nation State: Journal of International Studies*. <https://jurnal.amikom.ac.id/index.php/nsjis/article/view/148>
- Laut, I. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori, Penerapan, dan Riset Nyata-I Made Laut Mertha Jaya-Google Buku*. In (hal. 1–99). <https://books.google.co.id/books>.
- Novita, I. S. (2022). Metode Penelitian Kualitatif. In ). *Metodologi Penelitian Kualitatif. Solo: Cakra Books*.
- Patria, L. (2023). Mediatisasi Politik dan Personal Branding Agus Harimurti Yudhoyono Melalui Media Sosial Instagram. *Da'watuna: Journal of Communication and Islamic*. <https://journal.laaroiba.ac.id/index.php/dawatuna/article/view/3404>
- Riadi, S. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Najmu Books Publishing, Bandung.
- Safitri, Y., & Harahap, E. W. (2023). Analisis Perilaku Politik, Budaya Masyarakat dan Agama di Indonesia. *Journal of Education Research*. <https://jer.or.id/index.php/jer/article/view/392>
- Setiawan, M. C. A., Ginting, G. K. N., & Ilmar, A. (2020). Relasi Antara Politik Identitas Terhadap Proteksi Perdagangan dibawah Pemerintahan Donald Trump. *Journal of Political Issues*. <https://jpi.ubb.ac.id/index.php/JPI/article/view/32>
- Setiawan, R. (2017). Menjadikan Kesejahteraan sebagai Isu Inti Demokrasi. In *Indonesian Journal of Sociology and Education*. [journal.unj.ac.id](http://journal.unj.ac.id). <http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/ijsep/article/download/6231/4515>